

# **COMMUNITY DEVELOPMENT DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN**

Oleh

**Andi Sopandi**

Dosen Program Studi Sastra Inggris Fakultas Komunikasi, Sastra dan Bahasa Universitas Islam "45" Bekasi

## **Abstract**

*Community Empowerment program is often considered only as a slogan. The word is frequently used to attract general public attention. In fact, its implementation doesn't consider basic principle of the implementation of Community Development, and even its usage is only to fulfill the requirement of development program. Therefore, efforts that need to be done to understand about the true essence and definition of community empowerment and Comdev basic principle as the main requirement, especially in countermeasure of poverty.*

**Keywords:** *community development, polulist, self reliance, sustainability*

## **PENDAHULUAN**

Perubahan ekonomi global hingga kini cukup memberikan pengaruh yang besar terhadap dinamika kehidupan Negara dan masyarakat secara multidimensional. Perubahan tersebut di antaranya dipengaruhi oleh focus pembangunan yang berubah-ubah hingga pertumbuhan kesenjangan dan ketimpangan sosial antar-negara, antar-daerah bahkan antar-masyarakat. *Progress* pembangunan di atas tidak terlepas dari perkembangan sejarah setelah Perang

Dunia II (PD II). Ada beberapa isu penting berkaitan dengan setelah PD II. Isu pembangunan setelah PD II tersebut kemudian melahirkan 3 produk sejarah, meliputi:

1. Munculnya kekuatan baru di Belahan Barat dan AS tampil sebagai kekuatan dominan akibat implikasi "*Marshall Plan*".
2. Kekuatan Blok Timur "komunisme"
3. Lahirnya Negara-negara Baru Merdeka (NBM)

NBM inilah yang kemudian menjadi bahan perebutan pengaruh dan kekuasaan kedua belah pihak baik Blok Barat maupun Blok Timur. NBM pada posisi tersebut mencari bentuk-bentuk dan pola pembangunan untuk merancang pertumbuhan pembangunan di negaranya.

Implementasi dari penggunaan teori dan konsep pembangunan pada waktu itu, justru menimbulkan berbagai hal di antaranya:

- (1) Kecenderungan global setelah PD II: munculnya Negara-negara Baru Merdeka)
- (2) Pembangunan merupakan "... a *conscious and institutionalized attempt at societal development*" (upaya yang sadar dan melembaga) sehingga sehingga pembangunan bermuatan nilai, yaitu keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.
- (3) Pemahaman ini **relatif dari waktu ke waktu, dan cenderung subyektif atau berbeda** antara satu bangsa dengan bangsa yang lain

Sebagai akibat praktek pembangunan yang semula bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Namun, ternyata kenyataan yang terjadi justru berbeda dengan kondisi yang

diharapkan, sehingga muncullah beberapa kritik terhadap hasil pembangunan, di antaranya adalah:

<b>I.</b>	<b><i>Jobles Growth</i></b>
	Pembangunan seringkali tidak memberikan ruang kesempatan berusaha sehingga menghasilkan pertumbuhan lapangan kerja yang sedikit dan melahirkan pengangguran-pengguran baru.
<b>II</b>	<b><i>Ruthless Growth</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hasil Pembangunan menguntungkan sebgayaan saja</li> <li>• <i>Praktek Kebijakan Trickle Down-Effect</i></li> </ul>
<b>III</b>	<b><i>Voicelless Growth</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pertumbuhan tidak diikuti demokrasi dan <i>empowerment</i> (pemberdayaan)</li> <li>• Tekanan politik menutup <i>voices</i> (aspirasi)</li> <li>• Mengganggu pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Wanita diberi peran kecil dalam pembangunan ekonomi</li> </ul>
<b>IV</b>	<b><i>Rootless Growth</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan melenyapkan akar budaya minoritas karena Kesewenangan mayoritas</li> </ul>
<b>V</b>	<b><i>Futureless Growth</i></b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Generasi sekarang mengabaikan kebutuhan generasi mendatang</li> <li>• Pengrusakan Hutan</li> <li>• Polusi Sungai</li> <li>• Pemborosan Sumber Daya Alam</li> </ul>

- keinginan untuk mewujudkan keadaan yang lebih baik.
1. Pemahaman ini **relatif dari waktu ke waktu, dan cenderung subyektif atau** Kritik terhadap kondisi di atas, sangat dipengaruhi pada proses pemaknaan ril pembangunan (*the real meaning of development*) yang menurut Misra (2000), mengandung 3 hal, meliputi: Pembangunan sebagai **suatu proses bukan keadaan**
  2. Proses tersebut **tidak bebas nilai**
  3. Nilai-nilai tersebut **mengacu kepada tempat di mana masyarakat berada, bukan pada nilai-nilai dunia barat.** (Di sinilah muncul pemikiran melakukan pembangunan berbasis masyarakat)

Kajian pembangunan bersifat “*applied*” and “*multi-approach*”, dengan ciri-ciri sebagai berikut:

- (1) Dalam pemanfaatannya berbagai disiplin ilmu melampaui batas peralatan analisis murninya. Penalaran terhadap masalah pembangunan akan menggunakan pendekatan kelembagaan misalnya, atau pendekatan sosial lainnya.
- (2) Dalam menelaah masalah-masalah pembangunan lebih banyak digunakan pendekatan multi-disiplin.

## PEMBAHASAN

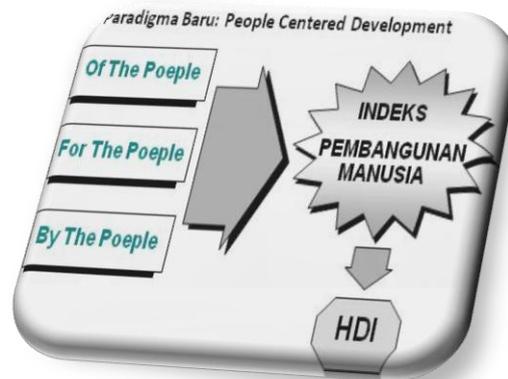
### Paradigma Pembangunan dan Konsepsi Pemberdayaan Masyarakat

Sepanjang sejarah pembangunan di Dunia hingga kini terdapat 4 (*empat*) paradigma pembangunan, meliputi:

- (1) **Paradigma pertumbuhan ekonomi** (bersifat *top-down*)
- (2) **Paradigma pemenuhan hebutuhan hidup** (bersifat *top-down*, kebijakan *trickle down effect*)

- (3) **Paradigma peningkatan kualitas manusia** (bersifat *bottom-up*, konsep *civil society* (masyarakat madani), pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan)
- (4) **Paradigma Peningkatan Daya Saing**

**Gambar 1.**



Pemberdayaan (*empowerment*) hadir sebagai proses panjang yang disebabkan terjadinya “*power disenfranchisement*” atau “*dispowerment*” yaitu peniadaan *power* pada sebagian masyarakat. Akibatnya, masyarakat tidak memiliki akses yang memadai terhadap asset produktif yang umumnya dikuasai para pemilik “*power*”.

Pada prinsipnya tujuan pemberdayaan adalah:

- 1) Melepaskan **belenggu kemiskinan dan keterbelakangan**
- 2) **Memperkuat posisi lapisan masyarakat** dalam struktur kekuasaan (Kartasasmita, 1999: 194)

Beberapa definisi tentang Pemberdayaan Masyarakat (*Community Development*) di antaranya sebagai berikut:

- (1) Upaya penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilannya mengambil keputusan dan berpartisipasi dalam kegiatan yang berdampak terhadap kehidupan masyarakat di masa yang akan datang (Ife, 1995 : 182)
- (2) Suatu konsep alternatif pembangunan pada intinya memberi tekanan pada otonomi pengambilan keputusan dair suatu kelompok masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung (melalui partisipasi), demokratis dan pembelajaran sosial melalui pengalaman langsung” (Friedmann, 1996: 145)
- (3) Kartasasmita (1996: 141) mengatakan bahwa memberdayakan masyarakat berarti meningkatkan kemampuan masyarakat dengan cara mengembangkan potensi-potensi masyarakat dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat seluruh lapisan masyarakat atau dengan kata lain memampukan dan memandirikan masyarakat dengan menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang.
- (4) Pemberdayaan bukan hanya meliputi penguatan individu anggota masyarakat tetapi juga pranata-pranatanya. Menanamkan nilai-nilai budaya modern seperti kerja keras, hemat, keterbukaan, tanggung jawab adalah bagian pokok dan upaya pemberdayaan

Selama ini pemberdayaan masyarakat seringkali implementasinya dilaksanakan dalam arti sempit, kadang hanya bersifat *charity* (sukarela) dan bentuk bantuan. Akibatnya, pemberdayaan hanya terjadi sekali dan tidak berkelanjutan serta memiliki ketergantungan yang tinggi. Oleh sebab itu, baik bagi praktisi, penentu kebijakan maupun elemen masyarakat perlu memahami prinsip dasar dalam pemberdayaan masyarakat.

Gambar 2.



Prinsip dasar pemberdayaan masyarakat tersebut meliputi:

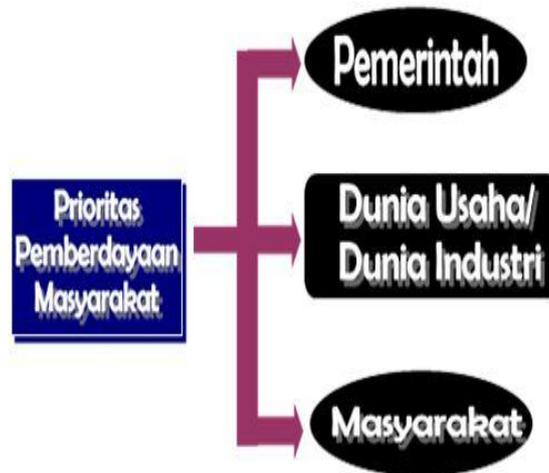
- (1) **Prinsip kerakyatan**, pembangunan diutamakan bagi sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat bukan orang-perorang,
- (2) **Prinsip keswadayaan**, bimbingan dan dukungan kemudahan yang diberikan mampu menumbuhkan keswadayaan, kemandirian, bukan ketergantungan,
- (3) **Prinsip kemitraan**, pelaku merupakan mitra kerja pembangunan yang berperan aktif dalam pengambilan keputusan dari seluruh proses kegiatan pembangunan,
- (4) **Prinsip bertahap dan berkelanjutan**, pembangunan dilaksanakan sesuai potensi dan kemampuan masyarakat serta memperhatikan kelestarian lingkungan.

sisi lain, implementasi pemberdayaan masyarakat secara praktis dapat dilihat dari berbagai segi kepentingan, sehingga perlu ada semacam pembagian peran (*role*) antar setiap elemen dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, sehingga akan tampak jelas prioritas pemberdayaan masyarakat di setiap elemen tersebut sebagai mana tertuang dalam gambar di bawah ini.

Dengan demikian, prinsip dasar pemberdayaan masyarakat dapat disimpulkan, sebagai berikut:

- (a) Pemberdayaan masyarakat hendaknya bukan membuat masyarakat menjadi tergantung pada program-program pemberian (*charity*)
- (b) Akan tetapi, setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri
- (c) Hasil akhir: memandirikan masyarakat dan membangun kemampuan untuk memajukan Kehidupan yang lebih baik secara berkelanjutan (*sustainable*)

Gambar 3.



### Pemahaman tentang *Community Development*

Kata “*empower*” atau “berdaya” dalam kamus bahasa ditafsirkan sebagai “berkontribusi waktu, tenaga, usaha melalui kegiatan-kegiatan berkenaan dengan perlindungan hukum”, “memberikan seseorang atau sesuatu kekuatan atau persetujuan melakukan sesuatu”, “menyediakan seseorang dengan sumberdaya, otoritas dan peluang untuk melakukan sesuatu” atau “membuat sesuatu menjadi mungkin dan layak”. Pada kamus yang lain ”.

Definisi pemberdayaan sendiri masih dalam perdebatan teoritik.

Dalam kosa kata pembangunan, konsep pemberdayaan adalah konsep yang paling sering diplesetkan (disalah-artikan) karediri ke arah menyangkut gangguan pada para pemegang kekuasaan saat ini (baik nasional maupun internasional), para pihak yang tidak berdaya (*powerlessness*) serta perubahan sosial.

Saat ini ada dua pemegang kekuasaan pada sistem kehidupan kita saat ini yakni:

- (1) Kelompok yang menguasai kekayaan alam atau keuangan dan
- (2) Kelompok yang menguasai ilmu pengetahuan. Di negara-negara dunia ketiga seperti Indonesia, kedua kekuasaan ini dipegang oleh segelintir orang.

Pada pandangan semacam ini, pemberdayaan adalah upaya membongkar monopoli kekuasaan politik dan ekonomi yang dipegang oleh segelintir orang dan dialihkan kepada rakyat kebanyakan. Dan, mendorong pemerintahan yang lebih bertanggung jawab kepada rakyat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan terjadi distribusi aset dan kekayaan yang lebih adil. Kelompok kedua menyatakan kapitalisme dan sosialisme telah gagal berkenaan dengan isu pengentasan kemiskinan. Para pemimpin lembaga-lembaga internasional dan pemerintahan nasional tidak memiliki jawaban bagaimana mengentaskan kemiskinan. Kelompok ini menyatakan harus ada perubahan kepemimpinan dengan memanfaatkan kepemimpinan masyarakat sipil untuk menemukan jalan ketiga (bukan kapitalisme ataupun sosialisme).

Kedua kelompok pemikir di muka tetap mendudukan pemberdayaan sebagai sesuatu yang bersifat dari atas (*top down*). Karena mereka tetap percaya yang memiliki sumberdaya adalah mereka. Untuk itu mendudukan orang-orang baik di dalam lembaga-lembaga yang berkuasa (seperti Bank Dunia, Presiden, DPR, DPRD, Bupati/Walikota) bisa mengubah keadaan. Kelompok ini sering disebut kelompok ilmuwan liberal atau progresif.

Pemberdayaan dalam kaca mata kelompok ini lebih cocok ditafsirkan sebagai bagaimana mengelola kekuasaan (*power*).

Kelompok ketiga yang sering dikenal sebagai kelompok reformis. Kelompok ini percaya bahwa kekuasaan tidak pernah diberikan tapi harus direbut. Ini adalah pelajaran dari sejarah. Jadi, pemberdayaan adalah tindakan-tindakan aktif untuk merebut kembali kekuasaan atas politik, ekonomi, sosial, budaya dan kekayaan alam. Karena itu konsep *empowerment* atau pemberdayaan dianggap sebuah konsep yang kontradiksi karena pemberdayaan hanya bisa terjadi bila rakyat melakukan sendiri agar bebas dari penindasan (*self-empowerment*).

Beberapa pokok dalam *Brundtland Report* tahun 1987, disebutkan beberapa konsep mengenai *Community Development*, antara lain :

- 1) Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan yang dapat mencukupi kebutuhan sekarang tanpa mengkompromikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri.
- 2) Pembangunan berkelanjutan memerlukan perubahan kerangka hukum dan kelembagaan.
- 3) Hukum yang diperlukan adalah hukum yang didukung oleh masyarakat sehingga menimbulkan partisipasi masyarakat yang lebih besar.
- 4) Cara yang terbaik adalah melalui:
  - a) Desentralisasi pengelolaan sumber daya yang menjadi penopang masyarakat setempat.
  - b) Pemberian suara yang efektif pada masyarakat itu mengenai penggunaan sumber daya tersebut
- 5) Selain itu perlu juga didorong:
  - a) Inisiatif-inisiatif masyarakat.
  - b) Pemberian wewenang pada organisasi-organisasi masyarakat.
  - c) Memperkokoh demokrasi setempat.

Berbagai definisi tentang *community development*, cukup banyak dikemukakan oleh para pakar. Secara universal badan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), merumuskan pula tentang definisi "*Community Development*" sebagai berikut:

"Suatu proses yang merupakan **usaha masyarakat sendiri** yang diintegrasikan dengan **otoritas pemerintah** guna **memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan kultural komunitas**, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. (Perserikatan Bangsa-Bangsa)".

Berdasarkan definisi tersebut, juga diutarakan beberapa prinsip-prinsip umum *Community Development*, meliputi:

- 1) Fokus perhatian ditujukan pada komunitas sebagai suatu kebulatan
- 2) Berorientasi pada kebutuhan dan permasalahan komunitas
- 3) Mengutamakan prakarsa, partisipasi, dan swadaya masyarakat
- 4) Keberlanjutan (*sustainable*) dan kemandirian

Berdasarkan prinsip-prinsip di atas, ada beberapa prasyarat yang harus dilakukan dalam melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, di antaranya adalah:

- 1) Pemahaman karakteristik masyarakat
- 2) Perumusan modal social (*social capital*)
- 3) Kemampuan membuka jaringan antar-masyarakat, pemerintah, dunia usaha dan industri dalam melaksanakan *Community Development*.

Gambar 4  
Prasyarat Implementasi Community Development



Berdasarkan polarisasi prasyarat awal di atas diharapkan akan mendapatkan informasi dari pemahaman karakteristik masyarakat di antaranya adalah:

- 1) Identifikasi masalah dan kebutuhan komunitas.
- 2) Kesepakatan sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas.  
Menemukan dan menyepakati cara dan alat mencapai sasaran yang disepakati.
- 3) Mampu bekerja sama secara rasional dalam mencapai sasaran. (Ndraha, 1987: 58)

Dengan demikian, terjadi sinergitas antara elemen pemerintah, masyarakat dan dunia usaha/industri dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat (*Community Development*) sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.

Gambar 5.  
Sinergitas Elemen Dasar Dalam Pemberdayaan Masyarakat



Permasalahan dalam pemberdayaan masyarakat, meliputi:

- 1) Proses perencanaan dan pengambilan keputusan dalam program pembangunan kerap kali dilakukan dari atas ke bawah ('*top-down*'). Rencana program pengembangan masyarakat biasanya dibuat di tingkat pusat (atas) dan dilaksanakan oleh instansi propinsi dan kabupaten.
- 2) Masyarakat sering kali diikutkan tanpa diberikan pilihan dan kesempatan untuk memberi masukan. Hal ini biasanya disebabkan adanya anggapan untuk mencapai efisiensi dalam pembangunan bagi masyarakat, masyarakat tidak mempunyai kemampuan untuk menganalisa kondisi dan merumuskan persoalan serta kebutuhan-kebutuhannya.
- 3) Dalam visi ini masyarakat ditempatkan pada posisi yang membutuhkan bantuan dari luar. Program yang dilakukan dengan pendekatan dari atas ke bawah sering tidak berhasil dan kurang memberi manfaat kepada masyarakat, karena masyarakat kurang terlibat sehingga mereka merasa kurang bertanggung jawab terhadap program dan keberhasilannya.

Oleh sebab itu, pola pendekatan dalam pemberdayaan masyarakat dalam konteks ini adalah:

- 1) Dari kondisi ini, pendekatan dikembangkan dengan menempatkan masyarakat sebagai pihak utama atau pusat pengembangan.
- 2) Pendekatan tersebut lebih bersifat memberdayakan masyarakat, yaitu model '*Pemberdayaan Masyarakat*' (PM).
- 3) Dasar proses pemberdayaan masyarakat adalah pengalaman dan pengetahuan masyarakat tentang keberadaannya yang sangat luas dan berguna serta kemauan mereka untuk menjadi lebih baik.
- 4) Proses ini bertitik tolak untuk memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, menggunakan dan mengakses sumber daya setempat sebaik mungkin, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.
- 5) Pemberdayaan masyarakat kerap kali dilakukan melalui pendekatan kelompok di mana anggota bekerjasama dan berbagi pengalaman dan pengetahuannya. Untuk

pengembangan kelompok ada kegiatan-kegiatan khusus yang sedang dilaksanakan dan juga ada kegiatan lainnya

### Masalah Penanggulangan Kemiskinan dalam Permerdayaan Masyarakat

Arah pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah:

1. Pengentasan kemiskinan struktural, keterpurukan, isolasi, ketidak berdayaan, ketidakadilan dll
2. Peningkatan kegiatan ekonomi produktif, (*revenue generating*), kesetaraan jender, KB mandiri
3. Peningkatan kualitas SDM, status gizi, kesehatan, etos kerja
4. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan *sosial forestry*, padat karya

Isu strategis dalam pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan, di antaranya adalah:

- 1) **Permasalahan Lingkup Eksternal Kota:** (keterkaitan kota dengan kota-kota lainnya atau dengan kawasan/wilayah yang lebih luas, termasuk keterkaitannya dengan pedesaan, di antaranya meliputi:
  - a) Ketidakseimbangan Pertumbuhan antara kota-kota besar, metropolitan dengan kota-kota menengah dan kecil
  - b) Kesenjangan pembangunan antara desa dan kota
  - c) Belum berkembangnya wilayah-wilayah strategis dan cepat tumbuh
  - d) Banyaknya wilayah yang masih tertinggal dalam pembangunan
- 2) **Permasalahan Internal Kota:** permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kota dan harus dihadapi oleh kota itu.
  - a) **Kemiskinan di Perkotaan**
  - b) Kualitas lingkungan hidup perkotaan
  - c) Keamanan dan ketertiban kota
  - d) Kapasitas daerah dalam pengembangan dan pengelolaan perkotaan

Gambar 6.



Secara sederhana, kemiskinan dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu:

- 1) Kemiskinan kronis (*chronic poverty*) yang terjadi terus menerus sering disebut juga sebagai kemiskinan struktural (fakir miskin), membutuhkan penanganan yang sungguh-sungguh, terpadu secara lintas sektoral dan berkelanjutan.
- 2) Kemiskinan Sementara (*Transient Poverty*) yang ditandai dengan menurunnya pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara sementara sebagai akibat dari perubahan kondisi normal menjadi kondisi kritis, bencana alam dan bencana sosial, seperti korban konflik sosial. Kemiskinan sementara jika tidak ditangani serius dapat menjadi kemiskinan kronis.

Kedua bentuk kemiskinan tersebut, sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik (a) faktor internal kultural yang menyebabkan kemiskinan di masyarakat maupun (b) faktor eksternal struktural yang menjadi bagian dari sumber kemiskinan. Faktor internal kultural dari sumber kemiskinan tersebut, meliputi:

- 1) **Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar** (sandang, papan, pangan, air bersih, kesehatan dasar, dan pendidikan dasar)
- 2) **Ketidakmampuan dalam menampilkan peranan sosial** (tidak mampu melaksanakan tanggungjawab sebagai pencari nafkah, sebagai orangtua, dan sebagai warga masyarakat, dalam suatu lingkungan komunitas)
- 3) **Ketidakmampuan dalam mengatasi masalah-masalah sosial yang dihadapinya** (tidak mempunyai keahlian yang sesuai dengan permintaan lapangan kerja/menganggur, kurang motivasi, kurang percaya diri, kurang mempunyai informasi)

Sementara sumber kemiskinan sebagai akibat dari faktor eksternal struktural, adalah:

- 1) Kebijakan publik yang belum berpihak kepada penduduk miskin
- 2) Tidak tersedianya pelayanan sosial dasar
- 3) Tidak dilindunginya hak atas kepemilikan tanah
- 4) Terbatasnya lapangan pekerjaan
- 5) Belum terciptanya sistem ekonomi kerakyatan
- 6) Kesenjangan dan ketidakadilan sosial
- 7) Dampak pembangunan yang berorientasi kapitalis

Dari kedua bentuk sumber kemiskinan, kemudian berdampak terhadap kemiskinan adalah:

- 1) Masalah kemiskinan yang dialami menjadi **semakin sulit ditangani**.
- 2) Beresiko menjadi **kemiskinan budaya**.
- 3) **Tidak ada kemauan/pasrah/ patah semangat** dalam keadaan situasi kritis cenderung melakukan tindakan a-sosial, berperilaku destruktif atau melakukan tindak kriminal.

**Tabel 1.**

AREA DIAGNOSIS	TOOLS YANG BISA DIGUNAKAN
Siapa si miskin? Untuk mengidentifikasi rumah tangga dan kelompok yang diajak berkonsultasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Klasifikasi Kesejahteraan</li> <li>■ Pemetaan Sosial dan Pemetaan Sumber Daya</li> </ul>
Sejarah kemiskinan di masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Urutan Kejadian Penting di Masyarakat (<i>History Timeline</i>)</li> <li>■ Wawancara mendalam</li> </ul>
Dimensi gender dalam kemiskinan – tingkat rumah tangga	Analisis Gender: <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Kontrol terhadap harta rumah tangga</b></li> <li>- <b>Pengambilan keputusan dalam rumah tangga dan masyarakat.</b></li> </ul>
Mata pencaharian utama dari masyarakat, dan sumber daya yang mempengaruhi	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analisis Sumber Mata Pencaharian</li> <li>■ <i>Pemetaan Sumber Daya</i></li> </ul>
Mengapa mereka miskin? Identifikasi penyebab langsung/tidak langsung/akar penyebab	Diagram Sebab Akibat Kemiskinan
<b>Pendalaman</b> Kecenderungan terutama yang berkaitan dengan sebab kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ Analisis Kecenderungan</li> <li>■ Prioritas Masalah</li> </ul>
Kapan Kerentanan muncul? Dan bagaimana masyarakat mengatasinya	Kalender Musiman – <b>Identifikasi coping mechanism</b>
Pola penggunaan waktu dan tenaga	Diagram Kegiatan Sehari-hari
Hubungan dengan lembaga dan atau orang-orang; Sumber informasi dan pengetahuan	Diagram Venn & Analisa Sumber Informasi

## SIMPULAN

Untuk melakukan penanganan dan penanggulangan kemiskinan tersebut, ada dua indikator keberhasilan yang dapat dipergunakan penanggulangan kemiskinan dalam rangka pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) **Indikator Ekonomi.** Peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan; terjadinya kemandirian masyarakat dalam kehidupan ekonominya; dan adanya kehadiran prasarana dan sarana fisik dan non-fisik.
- 2) **Indikator Sosial.** Tidak terjadinya gejala sosial sehingga tercipta hubungan yang harmonis antar masyarakat, perusahaan dan Pemerintah Daerah; dan meningkatnya citra dan performa sektor Pertambangan dan Energi di mata masyarakat dan Pemerintah Daerah

Upaya penanganan kemiskinan dalam paradigma pemberdayaan masyarakat tersebut, adalah dengan mengembangkan prinsip dasar *community development*, yang meliputi:

1. **Demokratis**, yaitu setiap pilihan kegiatan berdasarkan musyawarah yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat;
2. **Transparan**, yaitu pengelolaan kegiatan dilakukan secara terbuka sehingga dapat diketahui secara luas oleh masyarakat;
3. **Akuntabilitas**, yaitu pengelolaan program harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis dan finansial; dan
4. **Responsif**, yaitu pemilihan kegiatan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Prinsip *community development* tersebut akan terlihat tingkat keberhasilannya apabila dalam prakteknya tetap mengedepankan aspek "kemandirian masyarakat" dan aspek keberlanjutan. Oleh sebab itu, sangatlah mudah untuk menilai apakah sebuah program penanganan kemiskinan itu dikatakan berhasil atau tidak, minimal dapat dilihat apakah program tersebut justru memberdayakan masyarakat atau tidak, menumbuhkan kemandirian masyarakat atau tidak, dan apakah sebuah program masih tetap berlanjut dan tidak bergantung pada bantuan atau sebuah program yang bersifat serimonial atau temporer. Mudah-mudahan ini menjadi renungan buat kita semua untuk menyelami makna pemberdayaan masyarakat (*community development*) dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, A. dan S. Hadi. 1996. *Perencanaan pembangunan wilayah dan pedesaan. Prisma. Edisi Khusus. Tahun XXV. p: 49-62.*
- Arsyad, L. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah.* Yogyakarta : BPFE
- Aziz, I. J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia.* Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Barbier, E.B. and A. Markandaya. 1993. *Environmentally sustainable development: optimal economic condition. In Economics and Ecology, New Frontiers and Sustainable Development.* Edited by E.B. Barbier. Chapman & Hall. London. p: 11 - 28.
- Barlowe, R. 1978. *Land Resource Economics.* Third Edition. London : Prentice-Hall International

- Conway, G.R. 1984. *What is an ecosystem and why is it worthy of study. In An Introduction to Human Ecology Research on Agricultural Systems in Southeast Asia. Edited by A. Terry Rambo and P.E Sajise. University of The Philippines at Los Banos, Philippines. P: 25-38.*
- Dicken, P. and P. E. Lloyd. 1990. *Location in Space, Theoretical Perspective in Economic Geography.* Third edition. New York : Harper Collins Publisher
- Glasson, J.. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional.* Diterjemahkan oleh Paul Sihotang. Jakarta : Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Haeruman, H. 1996. *Pembangunan daerah dan peluang pemerataan pembangunan antar daerah.* Prisma Edisi Khusus. Tahun XXV. P: 41-48.
- \_\_\_\_\_. 1995. *Peran serta masyarakat dan keterpaduan dalam pembangunan yang berkelanjutan. Perencanaan Pembangunan.* No. 2 tahun 1995. P: 90-95.
- Huisman, M.I.M. 1994. *Sustainable land development in the Netherlands: the search for concept. In Sustainable Land Use Planning. Proceeding of an International Workshop, 2-4 September 1992, Wageningen, Netherlands. Elsevier, Amsterdam. p: 55-67.*
- Kartasasmita, Ginandjar. 2004. *Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta:
- Lewis, W.A. 1994. *Perencanaan Pembangunan, Dasar-Dasar Kebijakan Ekonomi.* Jakarta : Rineka Cipta
- Majidi, N. 1997. *Anggaran Pembangunan dan Ketimpangan Ekonomi antar Daerah.* Prisma No. 3 Tahun XXVI. P: 3-16.
- Megawangi, Ratna. 2007. *Semua Berakar Pada Karakter; Isu-Isu Permasalahan Bangsa.* Jakarta: Lembaga Penerbit FE-UI
- Munasinghe, M. 1993. *Environmental Economics and Sustainable Development. World Bank Paper Number 3.* Washington D.C.
- Pearce, D.W and Jeremy J. W. 1993. *World without End, Economics, Environment and Sustainable Development.* Oxford University Press.
- Pezzey, J. 1992. *Sustainable Development Concept, An Economic Analysis.* The World Bank, Washington DC.
- Rudito, Bambang. 2007. *Audit Sosial.* Bandung : Rekayasa Sains
- Sumodiningrat, Gunawan. 2007. *Pemberdayaan Sosial; Kajian Ringkas tentang Pembangunan Manusia Indonesia.* Jakarta: Kompas



